

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Karo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
2. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia memiliki pengaruh ataupun dampak yang sangat besar kepada masyarakat Kabupaten Karo yakni dari segi perekonomian, dimana banyak warga yang mengeluh karena sulitnya beraktivitas di luar rumah saat pandemi ini. Sedangkan sumber pencaharian sebagian besar masyarakat Kabupaten Karo adalah sebagai Petani, Pedagang, Supir bus dan lainnya.
3. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah yang mana Pemerintah Kabupaten Karo memiliki Peraturan Daerah sendiri dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Kemudian Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjamin kemasalahatan masyarakatnya karena Pemerintah

merupakan Khalifah Allah di muka bumi terhadap warga yang dipimpinnya. Maka dari itu, Penerapan Peraturan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 di Kabupaten karo sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Syari'at Islam khususnya Fiqh Siyasah namun belum dijalankan dengan maksimal sehingga masih ada masyarakat Kabupaten Karo yang melanggar aturan dalam Peraturan Bupati tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Karo Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Menurut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Karo harus meningkatkan penegakan hukum bagi pelanggar Protokol Kesehatan agar masyarakat bisa lebih tertib dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Kabupaten Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Dalam penegakan hukum, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjalankan penetapan sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

3. Disarankan untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Karo tentang bahayanya Corona Virus Disease 2019.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet ke-1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ash Shidiqie, Jimmly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- C.S.T Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Chatim, Nurmi. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro.
- Hafi, Anshari. *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*. Surabaya: Usaha Nasional, 2014.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- M. Nasir. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujib, Abdul. *Al-Qawaidul Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Partaonan Daulay, Saleh. *Menghadang Corona : Advokasi Publik di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Literia, 2020.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat, Cet.17*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumaryadi, Nyoman. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Umar Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

**DOKUMEN :**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. *Wilayah Kabupaten Karo*. Kabupaten Karo: Disdukcapil.

Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

**JURNAL :**

Bagus Brahmana, Ida dan AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “*Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali.*” *Jurnal Kertha Desa* 2, 1 (2020): 1-8

Istiatin dkk.” *Sosialisasi dan Edukasi Program Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Guna Meredam Kepanikan Sosial di Wilayah Desa Getan.*” *Jurnal BUDIMAS* 8, 8 (2021): 1-10.

Yuliana. “*Corona Virus Diseases (Covid 19); sebuah tinjauan literature.*” *Jurnal WellNess and Healthy Magazine* 3, 2 (2021): 187-192.

**KAMUS :**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.

Baskoro, Wahyu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Poerwadarminta, W.J.S. *kamus Umum Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Yogyakarta: Balai Pustaa, 2008.

**SKRIPSI :**

Sartika, R. *“Komunikasi Pemerintahan dengan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa”* Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

**WAWANCARA:**

Anita Br Karo. Masyarakat Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 10 November 2021.

Budiman, S.N. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 8 November 2021

Jakaria Tarigan, Abdul. Masyarakat Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 10 November 2021.

Juna, Amsal. Masyarakat Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 10 November 2021.

M. Cerah. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 8 November 2021.

Perangin-Angin, Suhut. Masyarakat Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 10 November 2021.

Sembiring, Antoni. Masyarakat Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 10 November 2021.

Surbakti, Juan. Staff Bagian Umum Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 30 Mei 2022

Tarigan, Brisi. Masyarakat Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 10 November 2021.

Tarigan, Nasib. Masyarakat Kabupaten Karo. Wawancara Pribadi, Kabupaten Karo, 10 November 2021.

**WEBSITE:**

Baskara, Bima (Kompas) *“Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”* <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> (6 September 2020).

Kementrian Kesehatan *“Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19”* [“https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/bagaimana-cara-mencegah-penularan-virus-corona](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/bagaimana-cara-mencegah-penularan-virus-corona) (8 September 2020).

Pemerintah Kabupaten Karo *“7 Instruksi Bupati Karo Cegah Penyebaran Virus Corona”* <https://www.karokap.go.id/id/berita/8582-ada-7-instruksi-bupati-karo-cegah-penyebaran-virus-corona> (7 Mei 2020).

Pemerintah Kabupaten Karo *“Profil Kabupaten Karo”* <https://www.karokap.go.id/id> (8 Agustus 2021).

- Perasso, Valeria (BBC News) “*Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus Corona ini*” <https://bbc.com/indonesia/dunia-57590872> (7 September 2020).
- Prabowo, Dani (Kompas) “*Fakta Pasien Covid-19 Pertama yang Meninggal di Indonesia*” <https://amp.kompas/nasional/read/2020/03/11/15131521/5-fakta-pasien-covid-19-pertama-yang-meninggal-di-indonesia> (6 September 2020).
- Wahab Ahmad, Abdul “*Melihat Corona dari Perspektif Aqidah dan Fiqh*” <https://islam.nu.or.id/post/read/117874/melihat-corona-dari-perspektif-aqidah-dan-fiqh> (7 Mei 2021)
- Yasmin, Puti “*Thaun Zaman Rasulullah, ini Kisah dan Penyebabnya*” <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329693/penyakit-thaun-zaman-rasulullah-ini-kisah-dan-penyebabnya> (6 Mei 2021).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Karo dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karo?</p>	<p>1. Kami dari pihak Satpol PP mengupayakan kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Karo ini sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 seperti melakukan sosialisasi umum terhadap masyarakat Karo agar dalam menjalankan aktivitasnya itu tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai aturan dari Bupati Karo.</p>
<p>2. Untuk hukuman seperti apa yang diberikan oleh Satpol PP dalam penegakan hukum pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease kepada pelanggar Protokol Kesehatan di Kabupaten Karo?</p>	<p>2. Untuk hukuman itu ada 2 jenis yaitu hukuman berat dan juga hukuman ringan, namun yang kami berikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan saat ini hanya hukuman ringan seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lari-lari kecil, menyapu jalan dan juga jalan jongkok, untuk denda seperti yang di buat dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 itu belum pernah dilaksanakan.</p>
<p>3. Bagaimana bentuk operasi Yustisi yang dijalankan di Kabupaten</p>	<p>3. Untuk operasi Yustisi yang kita jalankan setiap hari mulai dari</p>



<p>Karo?</p>	<p>pagi hingga malam atau yang biasa kita sebut razia Protokol Kesehatan dilakukan dengan adanya kerjasama semua instansi terkait seperti Polres, Pemkab, Kodim, Satpol PP, dan satgas Covid Kabupaten Karo. Kemudian petugas lapangan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan razia Proses baik sumber daya manusianya yakni banyaknya petugas yang diterjunkan kelapangan, sumber daya finansial juga terpenuhi untuk melakukan razia proses di Kabupaten Karo.</p>
<p>4. Apakah dalam menerapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020, Pemkab Karo melalui Satpol PP maupun organisasi lain yang melaksanakannya mendapati hambatan? Jika ada apa saja bentuk hambatan yang didapati?</p>	<p>4. Dalam penerapan aturan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Karo ini kita lumayan banyak mendapati hambatan seperti pertama, Masyarakat yang tidak mau menggunakan masker seperti itu dengan alasan susah dalam beraktivitas. Kedua, Sebagian besar masyarakat Karo ini merasa tidak peduli dengan adanya Virus Covid itu, mereka lebih takut dengan abu vulkaniknya gunung sinabung. Jadi sedikit lebih susahlah bagi kami petugas untuk menerapkan perilaku sehat dan menggunakan masker saat berada di luar rumah bagi masyarakat. Ketiga, Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya kondisi pandemi covid-19. Keempat, Rasa tidak percaya masyarakat terhadap berita-berita yang ada di media</p>

	<p>tentang Covid-19 karena tidak adanya bukti konkret yang sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai keberadaan virus tersebut dan akibatnya bagi manusia.</p>
<p>1. Dampak seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karo saat Pandemi Covid-19 ini?</p>	<p>5 Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya hasil panen warga yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai Petani</li> <li>2. Berkurangnya pelanggan para pedagang di Pasar</li> <li>3. Tidak terpenuhinya perekonomian masyarakat</li> </ol>
<p>6 Mengapa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 ini dikeluarkan?</p>	<p>6 Kalau Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> ini dibuat alasannya ya sudah tertera pada judulnya yakni sebagai upaya dari Pemerintah Kabupaten Karo untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Karo yang saat ini tengah marak di masyarakat.</p>
<p>7 Apa yang mendasari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 ini diterbitkan?</p>	<p>7 Dasar dari diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 ini yang pertama sudah di jelaskan juga tadi bahwa sebagai salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, kemudian</p>

	<p>yang kedua adalah untuk mengecilkan ataupun menghilangkan skala masyarakat Kabupaten Karo yang masih sering berkumpul di tengah pandemi, dan yang terakhir di dalam Peraturan Bupati itu sudah di lengkapi dengan adanya sanksi yang di tujukan bagi pelanggar, nah sanksi yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini nantinya dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar.</p>
<p>8. Berapa kali sosialisasi tentang Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 dilakukan dan ada berapa instansi yang turut serta dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 ini?</p>	<p>8 Untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat itu sudah di laksanakan yang mana kita juga melakukan kordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga Polres. Kemudian Sosialisasi tentang Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 ini dilakukan seminggu 5 kali kepada masyarakat Kabupaten Karo sehingga nantinya masyarakat bisa lebih paham mengenai bahayanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dapat mengancam nyawa manusia.</p>
<p>9. Apakah Pemerintah Kabupaten Karo sudah pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 di</p>	<p>9 Kalau Sosialisasi tentang Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan 9 9 Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian</p>

Kabupaten Karo?	Corona Virus Disease 2019 kepada masyarakat sudah dilakukan ke desa-desa, kemudian sekolah, instansi pemerintahan dan sebagainya.
-----------------	---



**DOKUMENTASI WA.WANCARA PENELITIAN**

Wawancara dengan Staff Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karo



Wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Karo



Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo



Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Karo



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Karo



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Karo



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Karo



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Karo



## DATA MASYARAKAT KABUPATEN KARO YANG TERPAPAR COVID-19



SUMBER : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO  
MEDIA CENTER COVID-19 KABUPATEN KARO

## GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN KARO

CALL CENTER (0628) 2332291  
[www.covid19.karokab.go.id](http://www.covid19.karokab.go.id)



DINAS KOMINFO  
KABUPATEN KARO